

EKSEKUTIF SUMMARRY

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 62 dijelaskan bahwa Pemerintah daerah mengembangkan system informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya system informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Pada ayat 3 disebutkan bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai Status Lingkungan Hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah laporan kinerja Kepala Daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Diharapkan dengan dilimpahkannya kedaerah pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh kepala daerah semakin baik.

Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada $0^{\circ}59''$ - $2^{\circ}28,6''$ LS dan $100^{\circ}19''$ - $101^{\circ}18''$ BT, dengan luas daerah 5.749,89 Km², yang memanjang dari utara ke selatan dengan panjang pantai sebesar 234 km. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pulau sebanyak 47 buah dan 27 buah sungai terdiri dari 20 buah sungai besar dan 7 buah sungai kecil. Pulau-pulau tersebut sangat berpotensi sebagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata bahari. Jumlah Kecamatan 15 buah yang memanjang dari utara ke selatan, dengan jumlah nagari 182 dan jumlah kampung 480. Luas Kabupaten Pesisir Selatan menurut penggunaannya , komposisinya terdiri dari 4,73 persen lahan sawah, dan 92,27 persen bukan lahan sawah. Luas kawasan hutan mencapai 73,12 persen, dan 61,88 persen diantaranya merupakan hutan lebat. Sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan hanya 11,2 persen saja dari luas

wilayah. Topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung dan berbukit-bukit yang merupakan perpanjangan dari bukit barisan dengan ketinggian permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter.

1. Maksud, Tujuan Ruang Lingkup

1.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

1.2. Tujuan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menginformasikan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Menjadi salah satu dasar dalam perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan oleh berbagai sektor baik pemerintah maupun swasta.
- c. Menjadi bahan evaluasi guna pengendalian implementasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.
- d. Menjadi bahan Evaluasi terhadap kondisi dan pengelolaan lingkungan hidup secara global.

1.3. Ruang Lingkup Penulisan

- a. Mengumpulkan data, menganalisis dan menghimpun kondisi lingkungan hidup dan pola kecenderungannya terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.
- b. Merumuskan isu strategis yang melibatkan pemangku kepentingan di wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan dan menganalisis dengan melihat kondisi, tekanan dan upaya pengelolaan yang telah dilakukan terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup.

2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang akan ditetapkan akan dijadikan sebagai bahan dalam penulisan analisa isu lingkungan hidup dengan menggunakan metoda *Pressure – State – Response* pada Bab III.

Tahapan yang dilakukan dalam penepatan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan melalui beberapa tahapan yaitu :

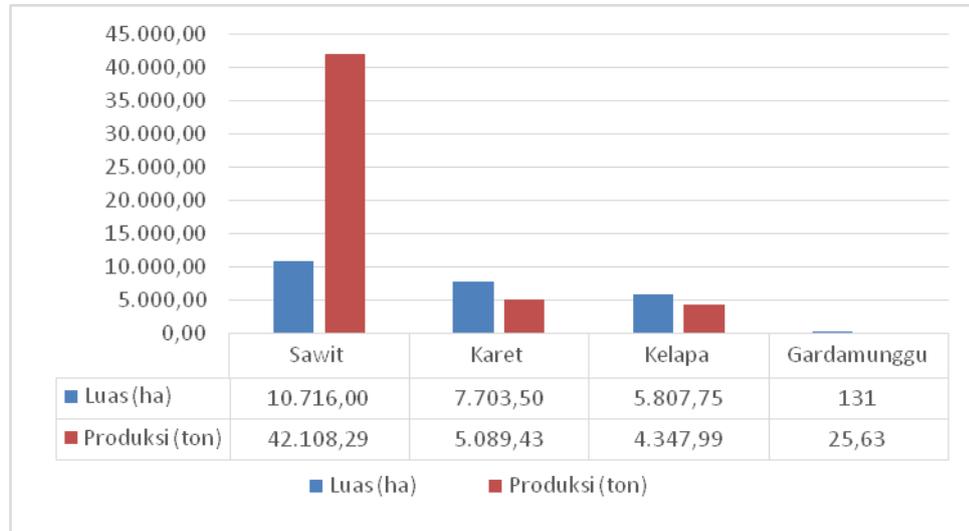
1. Tahap penjaringan isu di internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Isu didasarkan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta pengaduan lingkungan yang masuk ke Pos Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tahapan penjaringan isu prioritas lingkungan hidup yang dilakukan dengan melibatkan OPD terkait Kabupaten Pesisir Selatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat. Pertemuan penjaringan isu prioritas dilakukan pada tanggal 21 April 2016 di Dinas Lingkungan Hidup metoda yang digunakan adalah partisipatif dari semua peserta yang hadir.
3. Penetapan isu prioritas lingkungan hidup oleh Bupati Pesisir Selatan. Adapun isu prioritas lingkungan hidup yang ditetapkan yaitu :
 - a. Kerusakan wilayah pesisir terhadap tanaman mangrove dan terumbu karang.
 - b. Bencana longsor dan Banjir Bandang yang melanda pemukiman dan lahan pertanian masyarakat yang terjadi tiap tahunnya.
 - c. Kebakaran hutan dan pembalakan liar (*illegal logging*).

3. Analisis *Pressure, State, dan Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

3.1. Tataguna Lahan

Kondisi lahan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat sesuai untuk pengembangan budidaya perkebunan yaitu:kelapa sawit sebagai komoditas utama, karet, kelapa hibrida, kopi, kakao, dan komoditi lain yang meliputi gambir, pala, cengkeh, tebu, pinang, nilam, kemiri, gardamunggu dan tanaman obat-obatan sebagainya yang termasuk dalam komoditi unggulan lokal. Untuk pemasaran dijual ke daerah tetangga.

Gambar 3.1. Distribusi Komoditas Perkebunan Berdasarkan Luas dan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Olahan Data DIKPLHD, 2017.

Pengelolaan dan pengembangan perkebunan dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten. Perkebunan sawit merupakan perkebunan terbesar bila dibandingkan dengan komoditi lain. Luas perkebunan sawit 10.716,00 Ha dengan produksi 42.108,29 ton, karet 7.703,50 Ha, dengan Produksi 5.089,43 ton, kelapa 5.807,75 Ha dengan produksi 4.347,99 ton dan gardamunggu seluas 131,00 ha dengan produksi 25,63 ton.

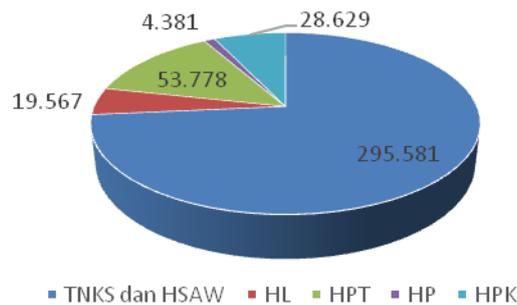
Kawasan perkebunan meliputi kecamatan: Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut. Pengelolaan perkebunan dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan maupun oleh masyarakat/rakyat.

Potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Dari potensi yang ada seluas 116.549 Ha, baru dimanfaatkan seluas 109.847 Ha sekitar 94.25% dan sisanya seluas 6.702 Ha sekitar 5.75% belum dimanfaatkan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013, seluas 401.936 ha (69,90% dari luas wilayah administrasi

Kabupaten Pesisir Selatan), yang meliputi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) seluas 295.581 ha, Hutan Lindung (HL) 19.567 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 53.778 ha, Hutan Produksi (HP) 4.381 ha dan Hutan Produksi Konservasi (HPK) 28.629 ha.

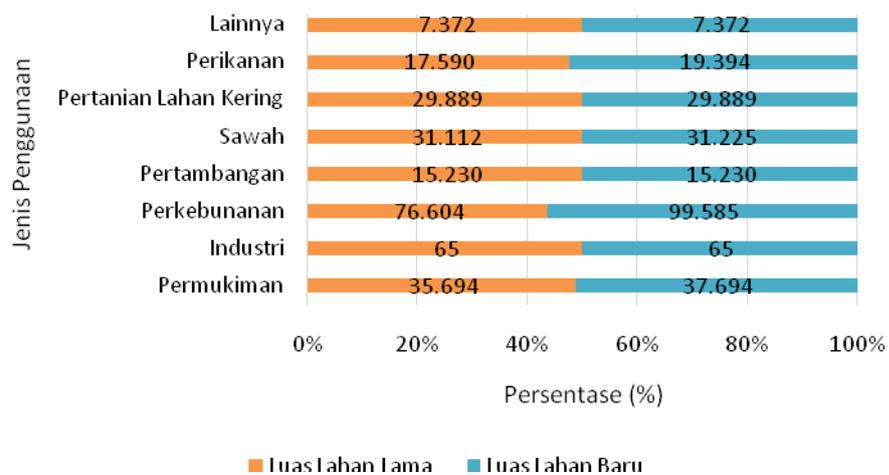
Gambar 3.2. Distribusi Kawasan Hutan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Olahan Data dari Buku Data DIKPLHD, 2017.

Terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang berpotensi terjadinya konversi lahan. Rata-rata terjadinya konversi lahan adalah 12,60%. Distribusi konversi lahan dari masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3. Sebaran Luas Konversi Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Olahan Data Tabel 11 Buku Data DIKPLH, 2017.

Konversi hutan dan lahan menjadi kawasan perkebunan seluas 3.543 ha yang tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan, yang merupakan usulkan pelepasan Kawasan Hutan (HPK) untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Agro Sukses Plantation.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, kawasan perlindungan diantaranya kawasan bergambut ada di Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut seluas 14.000 ha dan Kawasan resapan air di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Bayang Utara seluas 295.629 ha. Kawasan perlindungan lainnya adalah sempadan pantai 468 ha, kawasan sempadan sungai 15.691 ha, Kawasan terbuka hijau seluas 381.725 ha dan kawasan konservasi laut sebesar 16.286 ha.

Kawasan perkebunan meliputi kecamatan: Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut. Pengelolaan perkebunan dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan maupun oleh masyarakat/rakyat. lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan hanya 11,2% dari luas wilayah administrasi kabupaten.

Terdapat 7 (tujuh) perkebunan skala besar dengan luas areal adalah sebesar 80.487 ha. Perkebunan skala besar ini didominasi oleh perkebunan sawit yang dilengkapi dengan pabrik pengolahan minyak sawit. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) perkebunan skala menengah dengan luas 1.200 ha. Perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan luas total areal adalah 116.099 ha. berupa perkebunan kelapa, pala, palawija, budidaya gaharu.

Di Kabupaten Pesisir Selatan disamping terdapat lahan kering juga terdapat lahan basah dan gambut. Wilayah yang termasuk kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter yang berada di daerah Lunang dan Silaut. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung karena kemampuannya menyimpan/memendam karbon dioksida (CO₂) dan berkaitan dengan pemanasan global yang terjadi. Hampir semua kawasan bergambut ini sudah menjadi kebun kelapa sawit yang tersebar di

Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keberadaan gambut. Untuk itu maka lahan gambut terutama yang mempunyai ketebalan ≥ 3 m perlu dilindungi dan ditetapkan menjadi kawasan lindung. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan PP. No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).



Gambar 3.4. Perkebunan Sawit di Lahan Gambut

Sebaran bahan pertambangan batubara dan pertambangan mineral terdapat hampir di seluruh Kecamatan. Bahan pertambangan batubara potensial cukup besar dan diusahakan untuk memasok kebutuhan bahan bakar di beberapa industri dan pembangkit listrik tenaga uap.

Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki kekayaan tambang batu bara, emas dan biji besi. Saat ini, sudah 15 izin tambang. Diantaranya, dua izin pertambangan Emas dan 12 izin tambang Batu Bara.

Ke-12 izin pertambangan batu bara ini diantaranya sebanyak 3 izin di Kecamatan IV Jurai, 2 izin di Kecamatan Batang Kapas, 2 izin di Kecamatan Sutera, 3 izin di Kecamatan Basa IV Balai Tapan, dan sebanyak 2 izin pula di Kecamatan Lunang Silaut.

Pertambangan mineral logam seperti emas primer sudah dilaksanakan dan mempunyai dokumen studi lingkungan PT. Dempo Biji Emas, PT. Prima Perkasa Abadi dan PT. Atoz Mining berupa pertambangan batu bara. Sedangkan pertambangan mineral bukan logam, seperti pertambangan pasir besi menyebar di kawasan pesisir.

Permasalahan yang dihadapi adalah lokasi usaha pertambangan tersebut yang berada di dalam kawasan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya, sementara metode penambangan umumnya dilakukan secara terbuka yang dapat mengancam keberadaan hutan lindung disekitarnya. Kondisi fisik kabupaten ini sangat membutuhkan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor).

Dengan meningkatnya kebutuhan bahan bangunan berupa pasir, batu dan kerikil, membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk melakukan pertambangan mineral bukan logam. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) usaha pertambangan dengan total luas 66,76 ha dengan produksi 699.753,68 ton/tahun. Aktifitas ini senyatanya berdampak terhadap morfologi sungai dan sempadan sungai serta kualitas air sungai.

Guna meminimalisir dampak dari aktifitas pertambangan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara terpadu.

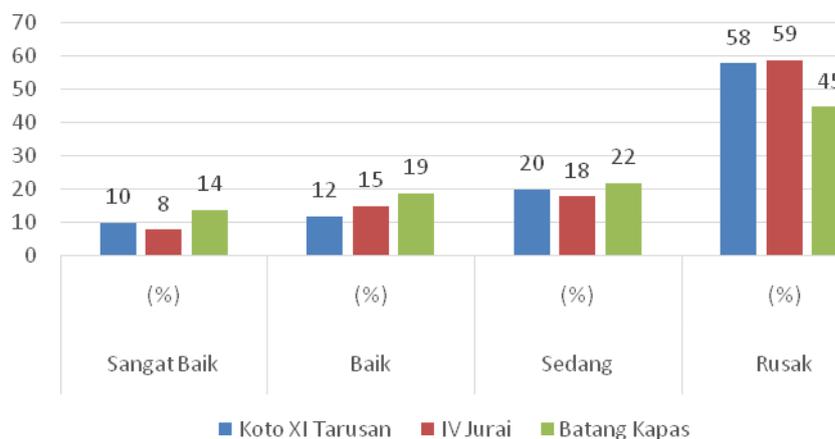
Potensi pesisir dan laut yang besar dan cenderung menurun karena pengelolaan dan pemanfaatannya yang masih terbatas. Luas perairan laut Kabupaten Pesisir Selatan ini $\pm 84,312 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai sekitar 247 Km. Potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar sekitar 35% yang tereksplorasi.

Potensi mangrove sebesar 622,82 Ha di wilayah pesisir, yang tersebar di seluruh perairan pantai pada lokasi-lokasi yang terlindung dari ombak besar dan angin kencang meliputi Carocok Tarusan, Teluk Betung, Air Haji, Lowong, Pancung Soal, Batang Kapas, pulau kecil dan besar lainnya, kawasan hutan bakau (mangrove) dan sepanjang pantai. Tutupan hutan mangrove paling banyak terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan 37,3 persen, terendah di Kecamatan IV Jurai 10,17 persen. Kondisi tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan penghijauan hutan mangrove agar tidak terancam keberadaannya.

Luas ekosistem terumbu karang $\pm 521,57 \text{ Ha}$ menyebar di perairan pesisir yang mengalami kerusakan 25,85% di Kecamatan Sutera dan 82,1 %

di Koto XI Tarusan. Dilihat dari kondisi tersebut lebih dari 85,25% rusak, hal ini hampir terdapat pada wilayah pesisir. Kondisi tutupan terumbu karang kondisi yang berkondisi baik ditemukan pada lokasi Pulau Cingkuak dan Pulau Penyu. Lebih detail persentase kerusakan terumbu karang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.5. Persentase tingkat kerusakan Terumbu Karang di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Olahan Data Tabel 10 Buku Data DIKPLH, 2017.

3.2. Kualitas Air

Kualitas air sungai relatif baik. Parameter BOD berada di bawah baku mutu pada baik pada periode pemantauan musim kemarau maupun musim hujan.

Pada periode pemantauan musim kemarau, parameter COD melebihi baku mutu yaitu pada Sungai Batang Tapan (30,2 mg/l) segmen hilir. Sedangkan periode pemantauan hujan, parameter COD yang melebihi baku mutu yaitu Sungai Batang Lengayang (37,15 mg/l) segemen hilir; dan Sungai Batang Salido (27,9 mg/l) segemen hilir.

Pemantauan kualitas air danau/embung dilakukan pada dua danau yaitu Danau Langgai dan Embung Ampiang Parak. Kualitas air danau/embung relatif baik semua parameter kualitas air baik parameter kimia, fisika maupun bakteriologis berada di bawah baku mutu.

Dari pemantauan kualitas air sumur penduduk di beberapa lokasi, menunjukkan semua parameter kualitas air sumur berada di bawah baku

mutu baik parameter kimia, fisika maupun bakteriologis. Air sumur penduduk masih alami terbebas dari pencemaran yang bersumber dari aktifitas domestik.

3.3. Kualitas Udara

Data pantau kualitas udara ambien terdapat di empat tempat dengan keterwakilan aktifitas yaitu kawasan industri (pada PT. Incasi Raya dan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi), kawasan perkantoran / domestik / transportasi (pada daerah RSUD M. Zein) dan kawasan pantai/domestik/transportasi (pada pelabuhan Carocok Tarusan).

Data pemantauan menunjukkan bahwa kualitas udara ambien cenderung baik khususnya pada daerah pantai karena dipengaruhi oleh iklim samudera. Begitu juga halnya dengan daerah perbukitan (pada bagian Timur), iklim pegunungan dengan kerapatan vegetasi yang baik mampu meredam polutan-polutan baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak.

Upaya peningkatan tutupan vegetasi (revegetasi) baik pada daerah perkotaan, lahan terbuka maupun kawasan hutan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mampu mereduksi NO_x dan SO_x yang dihasilkan dari aktifitas industri maupun transportasi.

3.4. Resiko Bencana

Sebagaimana isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan, kebencanaan menjadi isu penting dan strategis untuk dilakukan pengelolaannya secara tepat dan komprehensif.

Kawasan rawan bencana terbagi 3, di antaranya kawasan rawanbencana longsor tersebar di 9 kecamatan, kawasan gelombang pasangtersebar di 15 kecamatan dan kawasan rawan banjir tersebar di 15 kecamatan.

Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kawasan rawan bencana alam baik berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi. Bencana alam tersebut telah menimbulkan korban dan kerusakan di

beberapa wilayah. Kondisi ini terkait dengan letak geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang berpotensi terjadinya bencana alam. Gempa bumi terkait dengan kondisi geologi yang berada pada gugus Bukit Barisan. Selain itu daerah ini juga terletak pada jalur Patahan Sumatera dan lempeng benua yang rawan terjadinya gempa bumi dan berpotensi terjadinya Tsunami.

Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia–Australiadengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai Barat Sumatera, yang disebut dengan *Mentawai Fold Zone*. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami.

Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan termasuk beserta pulau-pulau kecil, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu :

- a. Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
- b. Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
- c. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokas pengungsian.

Banjir hampir sering terjadi terutama bila musim hujan. Daerah yang memiliki daerah terluas berpotensi terjadinya genangan banjir adalah daerah Barung-barung Balantai, Duku, Pasar Tarusan, Pasar Baru, Gurun Panjang, Salido, Painan, Lumpo, Jalamu, Pasar Kuok, Surantih, Kambang, Air Haji dan Tapan, Lunang dan Silaut.

Sepanjang tahun 2016 terdapat bencana banjir di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan

Batang Kapas dengan total area yang terendam banjir adalah 118 ha. Bencana banjir ini menimbulkan kerugian materil sebesar Rp 646.500.000, namun tidak ada menimbulkan korban jiwa.



Gambar 3.13. Bencana Banjir yang Terjadi di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2016.

Salah satu penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor adalah terdapatnya lahan kritis pada bagian hulu. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis atau lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk menilai kritis tidaknya suatu lahan, dapat dilihat dari kemampuan lahan tersebut. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan suatu lahan dapat dilihat dari besarnya resiko ancaman atau hambatan dalam pemanfaatan lahan tersebut.

Dalam menyikapi terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten telah mencanakan berbagai program yaitu:

- a. Program Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir, pada:
 - Alur sungai Batang Bayang Lubuk Gambir, Batang Lumpo, Batang Lengayang, Batang Kambang, Batang Kapeh, Batang Surantih, Batang Lubuk Nyiur, Batang Pelangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan dan Batang Nilau.
- b. Program Pengamanan Abrasi Pantai, yaitu: di Pesisir Pantai Air Haji dan Luhung, serta sepanjang Pantai Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5. Perkotaan

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Wilayah yang memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah Kecamatan Lengayang, Sutura dan Koto XI Tarusan. Ketiga daerah tersebut merupakan prioritas utama pengembangan pemukiman. Sementara itu Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang rendah. Sedikitnya jumlah penduduk tersebut menimbulkan terhambatnya aktifitas sosial-ekonomi, maka pada kecamatan tersebut dikembangkan kegiatan permukiman sehingga aktivitas non permukiman dapat berkembang dengan bertambahnya penduduk dan membuka keterisoliran wilayah di Kecamatan tersebut.

Aktifitas sosial-ekonomi masyarakat berdampak pada timbulan sampah. Pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak (Kecamatan Lengayang) akan menghasilkan sampah terbanyak pula. Karena jumlah penduduk berbanding lurus dengan timbulan sampah.

Jika sampah domestik ini tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak terhadap lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada manusia itu sendiri, dapat berupa peningkatan jumlah kasus penyakit dan gangguan kesehatan.

Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat mengurangi beban pemerintah kabupaten untuk mengelola sampah. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pembentukan kelompok bank sampah. Terdapat 3 (tiga) kelompok bank sampah di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu di Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Koto XI Tarusan.

4. Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara melibatkan masyarakat

terutama masyarakat yang berada di lokasi setempat dimana kegiatan inovasi daerah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun inovasi lingkungan unggulan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan diuraikan sebagai berikut :

4.1. Pengelolaan Sampah Dengan Menggunakan Perahu

Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dijadikan salah satu destinasi wisata khususnya wisata bahari dan ekowisata yang berada di wilayah administrasi, tingkat kunjungan wisata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik wisata domestik maupun wisata luar negeri.

Meningkatnya kunjungan wisata secara langsung memberikan tekanan terhadap lingkungan dan apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan maka akan mengalami degradasi lingkungan di objek wisata akan mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan menyediakan perahu yang akan membersihkan sampah-sampah disepanjang pantai pada lokasi-lokasi objek wisata. Pengelolaan sampah ini melibatkan masyarakat-masyarakat local yang berada di lokasi objek-objek wisata, sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki dan menjaga dari masyarakat terhadap objek wisata dan lingkungan.

Perahu-perahu sampah yang terdapat di lokasi objek wisata dapat dilihat sebagaimana Gambar 4.1. berikut :

Gambar 4.1. Masyarakat Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2016

Gambar 4.2. Perahu Pengangkut Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2016

4.2. Inovasi Sesuai Dengan Dengan Juknis

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang sangat memerlukan perhatian serius dari semua komponen seperti Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Salah satu komponen yang sangat penting adalah perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan lingkungan serta SDM yang akan melaksanakan meminimalisasi dampak lingkungan yang akan terjadi.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan telah menganggarkan dana melalui APBD sebesar Rp 871.430.461,- jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 694.105.216,- maka pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar (11,32 %), disamping dana APBD didukung pula oleh dana APBN sebesar 941.397.000,- dan Bantuan Luar Negeri Sebesar 1.812.827.461,- sebagaimana tabel 50.

SDM yang melakukan pengelolaan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2016 sebanyak 28 Orang (6 orang Strata 2/S2 dan 14 orang Strata 1/S1) sebagaimana tabel 49. Sedangkan kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat adalah kegiatan Pelatihan 3R yang dilakukan oleh Kelompok Bank Sampah Bersih Bersinar Nagari Painan sebagaimana tabel 47.

**DINAS INGGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**JL. ROHANA KUDUS TELP/FAKS. 0756 -21509
PAINAN**